

# AGAMA, NEGARA, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN: PEMIKIRAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911-1989)

Supardi Dwimaputra

UIN Imam Bonjol Padang

[dwimaputrasupardi@yahoo.com](mailto:dwimaputrasupardi@yahoo.com)

## ABSTRAK

Tulisan adalah penelitian tokoh yang berusaha mengungkap dan mengkaji pemikiran seorang tokoh tentang hubungan agama negara ekonomi dan kesejahteraan, yaitu: Sjafruddin Prawiranegara. Difokuskan kajian dalam beberapa aspek di atas adalah lebih disebabkan karena beberapa alasan, pertama; setelah ditelaah tulisan-tulisan yang dituangkan oleh Sjafruddin dalam berbagai tempat dapat disimpulkan bahwa, topik pembahasannya ada dalam dua aspek, yaitu; aspek ekonomi dan aspek politik. Kedua; oleh karena semasa hidup beliau banyak berkecimpung dalam masalah perjuangan kemerdekaan dan setelah merdeka menduduki jabatan penting dalam pemerintahan dan ketatanegaraan. Dalam karyanya Sjafruddin lebih mendasarkan semua aktifitasnya dengan konsep-konsep agama yang dianutnya (Islam), misalnya dalam masalah politik, pemerintahan serta kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan pembangunan bangsa. Metode analisa data yang akan dipakai dalam tulisan ini adalah deskriptif-analisis serta komparatif, yaitu mendeskripsikan pokok-pokok pikiran Sjafruddin Prawiranegara tentang Agama, Negara, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Sjafruddin adalah seorang yang fanatis terhadap syariat Islam sekaligus moderat dalam memandang realitas kehidupan. *Kedua* dalam hal agama dan negara, Syafruddin berpendapat bahwa agama dan negara bersifat integralistik dan tidak bisa dipisahkan satu-sama lain, *Ketiga*, Sjafruddin berkomitmen kuat terhadap ajaran agama dan kemajuan bangsa, sehingga rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan itulah Sjafruddin menyarankan konsep utama dalam usaha negara untuk mewujudkan stabilan ekonomi yaitu dengan ekonomi Islam, dengan menjaga pilar-pilar penting ekonomi dalam sebuah negara yaitu, bank, uang dan mengurangi modal dan investasi asing dalam pembangunan.

## KATA KUNCI

Sjafruddin Prawiranegara, Agama, Negara, Aspek Ekonomi, Kesejahteraan sosial

## PENDAHULUAN

Secara garis besar pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu: gerakan nasionalisme no agama dan nasionalisme Islam, lebih rinci lagi ada juga yang memilih bekerja sama dengan pihak penjajah "golongan kooperator" terhadap kolonialisme (Kartodirdjo, 1993; Poesponegoro & Notosusanto, 1984). Dari berbagai bentuk pergerakan kemerdekaan itu Syafruddin Prawiranegara lebih memilih yang sifatnya kooperator, dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum cukup tenaga untuk mengelola negara ini (Rosidi, 1986; Saepudin, 2017)

Ada empat corak dan tipe pemikir di Indonesia yaitu: Pertama, tipe Soekarno yang mengakui kebenaran ajaran Islam dan hidup sebagai Muslim, tetapi tidak percaya kepada organisasi Islam. Kedua, tipe Sutan Syahrir yang meskipun secara formal memeluk agama Islam, tetapi tidak mempunyai kesadaran jiwa Islam, kesadaran dan jiwanya adalah

Humanisme barat. Ketiga, tipe Tan Malaka yang meninggalkan kepercayaannya dan menjadi seorang Komunis, walaupun tidak terang-terangan memusuhi Islam. Keempat, tipe Syafruddin Prawiranegara yang tetap memegang teguh kepercayaan agamanya dan percaya kepada organisasi politik Islam serta mempunyai keahlian dalam suatu bidang ilmu modern yang tidak dilepaskannya dari sudut kepercayaannya sebagai Muslim (Rosidi, 1986).

Syafruddin Prawiranegara dalam berbagai karyanya, telah banyak mendeskripsikan keadaan bangsa Indonesia. Setelah mengurai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, beliau menawarkan solusi-solusi yang harus ditempuh oleh pemerintah saat itu. Pada masa Orde Lama misalnya, menurutnya kesalahan mendasar yang dilakukan pemerintahan Orde Lama adalah "tidak dibenarkan adanya selisih pendapat, yang diizinkan adalah pendapat yang mendukung pendapat resmi dari kalangan pemerintah, dengan demikian tidak didapatkan informasi-informasi yang benar dari pihak lain".

## METODE

Kondisi seperti ini tentu tidak kondusif bagi bangsa yang sedang mengalami berbagai masalah, termasuk dalam bidang ekonomi (Abas, 2013). Di samping itu, Orde Lama juga lebih cenderung meninggalkan dan menjauhkan masyarakat dari paham Ke-tuhanan. Alasan Syafruddin berpendapat demikian adalah bahwa, pemerintah Orla lebih berpihak kepada partai komunis dan memberikan peluang serta kiprah yang banyak kepada partai komunis untuk berkkiprah dalam pemerintahan. Merespon situasi ini Syafruddin mengemukakan kritiknya bahwa, perbaikan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya dengan perbaikan teknis ekonomi semata, akan tetapi juga harus diikuti dengan perbaikan mentalitas dan jiwa manusia Indonesia (Prawiranegara, 1988).

Kritikan-kritikanya juga ditujukan kepada Orde Baru, menurut Syafruddin, bangsa Indonesia akan terus terpuruk jika penyelenggara negara banyak diemban oleh orang-orang yang tidak amanah dan tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Tidak amanah dan tidak yakin kepada Tuhan menurutnya akan menggiring orang untuk berbuat penyimpangan-penyimpangan dan penelewengan dari aturan Allah SWT yang pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat (Wijaya, 2016).

Dalam tulisan ini, penulis akan fokus mengkaji pemikiran keagamaan Syafruddin Prawiranegara, lebih khusus pemikirannya tentang agama dan negara. Syafruddin Prawiranegara menurut penulis adalah salah seorang intelektual yang produktif di masanya, hal ini dapat disimpulkan dari fakta yang dapat penulis kumpulkan. Ada 86 tulisan beliau yang membicarakan berbagai kondisi umat termasuk yang terjadi di Indonesia. Uniknya pemikirannya selalu bersandar kepada agama yang dianutnya yaitu Islam. Berdasarkan inilah penulis merasa perlu menyibak pemikiran keagamaannya khususnya pemikirannya tentang agama dan negara. Syafruddin Prawiranegara dalam karyanya *Al-aqobah (Pendakian yang tinggi beberapa pikiran tentang pembangunan)*, menjelaskan bahwa ideologi/keyakinan akan mempengaruhi sikap dalam berbagai hal, ideologi/keyakinan menurutnya merupakan *driving force* yaitu sebagai motor penggerak termasuk dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Berpijak dari ungkapan Syafruddin Prawiranegara di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran keagamaan Syafruddin Prawiranegara ini, utamanya yang berkaitan dengan masalah agama dan negara dan Bagaimana hubungan agama dan negara dalam pandangan Syafruddin Prawiranegara.

Penelitian ini berbentuk deskriptif-analitis; tentang data penting atau naskah yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji (Kartodirjo, 1997), yaitu berkenaan dengan pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang agama, negara, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Beberapa pendekatan ini akan digunakan secara menyeluruh. Tokoh yang diteliti dalam penelitian ini adalah tokoh yang sudah wafat, oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Penelitian ini berupaya melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa masa lampau dan berbagai gejala keagamaan yang berkaitan dengan masalah politik atau agama dan negara, sosial, ekonomi dan budaya. Proses rekonstruksi dalam sebuah penelitian sejarah, tidak bisa dilakukan secara umum, melainkan perlu adanya fokus tertentu yang dijadikan sebagai bahasan. Selanjutnya, ditegaskan oleh Sumadi Subrata (2006), bahwa proses rekonstruksi harus dilakukan secara sistematis, Obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Agama dan Negara serta ekonomi dan kesejahteraan sosial. (Koentjaraningrat, 1980).

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari dua bentuk yaitu; sumber data primer dan sumber data skunder. Prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap penelitian terfokus. Pada tahap pertama, (tahap orientasi), peneliti akan berusaha mengumpulkan data secara umum tentang tokoh dalam hal ini Syafruddin Prawiranegara lewat karya-karyanya dan mencari hal-hal menarik dan penting dari pemikiran sang tokoh, dalam hal ini pemikiran beliau tentang agama dan negara. Pada tahap kedua, Eksplorasi, peneliti akan mengumpulkan data lebih terarah dan fokus sesuai dengan fokus penelitian penulis, Pada tahap studi terfokus; peneliti akan melakukan studi secara mendalam dan terfokus pada masalah keberhasilan, keunikan dan karya-karya sang tokoh yang dianggap penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengumpulan data-data terhadap tokoh yang sudah meninggal dapat dilakukan lewat pengumpulan karya-karyanya yang dijadikan sumber data primer bagi penelitian yang penulis lakukan. Disamping itu penulis juga akan menjadikan karya-karya orang lain yang dianggap berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang

dilakukan sebagai literatur penunjang dalam penelitian ini (Hasan, 1993).

Sedangkan data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menelaah data-data dengan maksud menemukan pokok-pokok permasalahan dan hubungannya di antara bagian-bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang pokok-pokok yang dibahas dalam pemikiran Syafruddin Prawiranegara ini.

## TEMUAN DAN BAHASAN

### Perjuangan Syafruddin Bagi Indonesia

Karir Syafruddin bermula dari karyawan atau pegawai siaran radio swasta, anggota badan pekerja KNIP (1945), Menteri Keuangan 1946M, Menteri kemakmuran 1947M, Wakil perdana menteri 1949M, Ketua atau Presiden pemerintahan Darurat 1948M (Zed, 1997) dan Gubernur Bank Sentral/BI 1951M. Beliau juga pernah menjadi pemimpin Masyumi dan anggota pengurus yayasan Al-azhar. Konsistensi Syafruddin dalam mempertahankan prinsip tidak pernah goyah dan melemah, baik ketika ia berkiprah dalam pemerintahan atau ketika beliau sedang berada di luar pemerintahan. Lebih jauh dari itu Syafruddin adalah sosok yang “keras” dengan prinsip dan terbuka dengan gagasan orang lain (Prawiranegara, 1986).

Dalam catatan biografi Syafruddin, beliau tidak pernah mempelajari Islam di sekolah formal, bahkan ia lebih memilih jalur pendidikan umum sampai ke pendidikan tinggi. Pendidikannya berawal di sekolah ELS, MULO, AMS (1931) kemudian melanjutkan pendidikan di RHS (Rechts High School), yaitu sekolah tinggi ilmu hukum (Rosidi, 1986). Syafruddin adalah sosok yang gemar membaca, termasuk buku-buku filsafat. Dua buah buku filsafat yang cukup berkesan dalam pemikiran Syafruddin adalah *Das Kapital* karya Karl Marx dan *Manifesto Komunis* Karl Marx dan Engels, buku ini telah mengguncang sendi-sendi keimanan Syafruddin terhadap Tuhan. Keguncangan yang terjadi dalam diri Syafruddin ini, memunculkan kesadarannya untuk mendalami Islam, oleh karena itu menurut Syafruddin bagaimanapun bahasa Arab harus dikuasai sehingga informasi-informasi Islam dapat dicari di samping dapat meningkatkan pemahaman dan pendalaman terhadap kebenaran ajaran-ajaran Alqur'an (Sudarjat, 2017).

Secara naluriah intelektualitas Syafruddin lebih cenderung kepada pemikiran-pemikiran sosialis yang cenderung berfikir “bebas”. Ini

merupakan penilaian yang diajukan oleh Oleh Ajib Rosidi dalam bukunya “Syafruddin lebih takut Kepada Allah SWT”. Kegalauan dan kebingungan pernah melanda dirinya, dalam kondisi seperti itu pun Syafruddin tetap mampu mengedepankan keimanan dan hati nuraninya untuk memilih antara Sosialis atau Masyumi, ini harus dilakukan karena ia seorang anggota KNIP harus memimpin partai politik yang ada pada waktu itu, pada akhirnya jatuhlah pilihannya kepada partai Masyumi, satu-satunya partai politik Islam yang menampung aspirasi umat Islam di Indonesia (Rosidi, 1986).

Karirnya di dalam pemerintahan dimulai dari seorang anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat adalah lembaga yang di bentuk sebagai pengganti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang baru saja dibubarkan. Pada prinsipnya fungsinya adalah sebagai penasihat presiden, maka dibentuklah oleh presiden dan wakil presiden sebanyak 135 orang anggota. Dalam Perkembangan selanjutnya KNIP juga berfungsi sebagai legislatif oleh karena pemerintahan sudah di ubah dari bentuk presidensial ke bentuk parlementer. Maka atas keinginan anggota, presiden menyetujui dengan keluarnya dekrit tanggal 16 Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan legislative kepada KNIP (Noer, 2005).

Ketika Sultan Syahrir ditunjuk sebagai formatur kabinet, maka ia berkeinginan menunjuk Syafruddin sebagai menteri keuangan. Namun tawaran itu ditolak oleh Syafruddin dengan alasan, jabatan itu belum pantas ia emban. Kabinet Syahrir yang pertama ini tidak bertahan lama. Pada tahap akhir dari umur Kabinet ini, Syahrir menyerahkan mandate dari pada presiden. Tapi kemudian presiden memilih Syahrir kembali, maka pada tanggal 3 Maret 1946 terbentuklah kabinet Syahrir ke-2, sedangkan Syafruddin dipercayakan sebagai Menteri Muda Keuangan dan yang menjadi Menteri Keuangan adalah Ir. Rmp Surachman Tjokrodisurya. Dalam Kabinet Syahrir ke-3 yang di bentuk tanggal 2 Oktober 1946, Syafruddin ditunjuk sebagai Menteri Keuangan inilah rencana uang ORI bisa dilaksanakan (Rosidi, 1986)

Sebetulnya rencana pembuatan uang Republik Indonesia ini sudah direncanakan semenjak tahun 45, tepatnya semenjak tanggal 24 Oktober 1945. Namun keadaan keamanan tidak memungkinkan, maka percetakannya selalu tertunda. Dengan melalui usaha keras, barulah ini terlaksana dan ORI dapat dikeluarkan pada tanggal 29-30 Oktober 1946. Keinginan yang keras untuk menerbitkan ORI ini di dasari oleh karena ORI salah satu alat untuk

memperjuangkan kemerdekaan RI sebagai tanda Negara yang sudah berdaulat.

Dalam kabinet Moh. Hatta beliau dipercayakan sebagai Menteri Kemakmuran yaitu pada tahun 1948. Dalam ia menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah PDRI berdiri dan langsung dipimpin oleh Syafruddin sendiri disepanjang kampung pendalaman Sumatera. Semenjak pembentukan pemerintahan darurat ini, maka tugas-tugas kenegaraan tentu akan diemban oleh PDRI, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit dan berat. Namun karena didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap Negara ini sulit tetap dipikul oleh ketua PDRI. Hal ini tercermin dari ungkapan Syarifuddin Prawiranegara "...perjuangan berarti anggota-anggota pemerintahan RI lainnya, menghentikan perjuangan berarti mengkhianati cita-cita dan terhadap korban-korban yang rela jatuh mati atau cacat seumur hidup di medan perjuangan. Tidak ada di antara mereka itu yang berani mengharapkan bahwa pemerintahan darurat akan bisa memperoleh kemenangan militer dengan perjuangan itu. Tetapi sebaliknya mereka yakin bahwa kita masih melanjutkan perjuangan begitu rupa hingga Belanda tidak dapat memperoleh kemenangan militernya..." (Prawiranegara, 1977).

Ketika kabinet NKRI terbentuk, yang dibentuk M. Natsir, Syafruddin terpilih sebagai Menteri Keuangan tahun "1950". Pada akhirnya jabatannya sebagai Menteri Keuangan jatuh bersamaan dengan jatuhnya Kabinet Natsir. pada tahun 1951 dia ditawarkan dengan jabatan Presiden *De Javasche Bank*, mulanya dia menolak namun karena desakan banyak pihak akhirnya menerima juga, lebih tepatnya ia diangkat secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 14 Juli 1951. Tugasnya yang pertama dalam jabatannya yang baru adalah melakukan langkah-langkah untuk nasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Sentral Indonesia Setelah BI terbentuk, maka dia juga terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia, jadi dapat disimpulkan bahwa Syafruddin Presiden *De Javasche Bank* yang terakhir dan gubernur bank yang pertama (Wulandari, 2012).

Disaat kabinet Juanda dibentuk, dirasakan oleh masyarakat khususnya oleh pengurus-pengurus Masyumi bahwa ancaman Komunis sedang "dilancarkan" di Indonesia, oleh karena itu banyak para tokoh nasional yang mengingatkan Soekarno, disamping itu ketimpangan yang terjadi di pemerintahan Soekarno tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Bertumpu dengan berbagai masalah itu maka muncullah gerakan oposisi terhadap pemerintah, terutama di Sumatera hal ini menimbulkan kegoncangan politik di tanah air.

Gerakan-gerakan oposisi itu banyak terlihat di luar pulau Jawa, khususnya di Sumatera dan Sulawesi. Salah satu gerakan oposan pemerintah itu adalah : PRRI- Permesta. Para tokohnya: M. Simbolon, HN. (Ventje) Sumuel, M. Saleh Lahode, Ahmad Husain, Sumitro Djojo Hadikusuma, Syafruddin Prawiranegara, Burhanudin Harahap, Assat. Anggapan dan fonis pemerintah pusat, bahwa pergerakan PRRI adalah pemberontakan tidaklah sesungguhnya benar, bantahan terhadap tuduhan pemerintah pusat atas PRRI itu sudah ditulis panjang lebar oleh salah seorang sejarawan dari Universitas Negeri Padang, yang bernama Mestika Zed, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya PRRI bukanlah gerakan pemberontakan akan tetapi sebuah gerakan yang melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan pusat dalam beberapa kebijakan politik dan pembangunan, termasuk terlalu dekatnya pemerintahan soekarno dengan Komunis Indonesia (Zed & Chaniago, 1999).

Pada akhirnya inilah yang membawa para tokoh-tokohnya ke karantina orde lama, termasuk Syafruddin (Madinier, 2013). Polemik para tokoh ini dengan Soekarno terus berlanjut sampai akhir orde lama, bahkan ketika Syafruddin berada dalam tahanan politik orde lama, pernah bermohon kepada Soekarno agar ia diizinkan untuk tinggal di luar negeri, namun Soekarno tidak mengizinkannya.

Banyak karya-karya nyata yang sudah dipersembahkan oleh Syafruddin Prawiranegara ini untuk kepentingan bangsa dan negara, mulai semenjak masa pergerakan sampai masa kemerdekaan sudah diraih oleh Indonesia. Sebagai contoh adalah mengemban tugas yang teramat berat dipercaya sebagai pemeimpin tertinggi PDRI di wilayah Sumatera barat. Mungkin kalau boleh penulis istilahkan sosok inilah Presiden yang sesungguhnya, yang sanggup mengemban amanah sebagai kepala negara di saat negara dalam keadaan darurat (*dial President*). Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan belanda, beliau dengan ikhlas mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Hatta.

Perjuangan kemerdekaan dalam perjuangan kemerdekaan, yang mengharuskan Syafruddin hidup dalam hutan belantara di daratan sumatera, khususnya sumatera Barat sekarang, tidak menyurutkan semangat intelektualnya untuk berkarya, sehingga sebanyak delapan buah dari 86 karyanya dihasilkan dalam hutan sumatera ketika beliau menjabat sebagai presiden darurat Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara terlihat sebagai sosok yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, mulai dari disiplin ilmu filsafat ilmu hukum pengetahuan ekonomi dan pengetahuan agama Islam.

## Agama dan Negara Menurut Syafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara adalah salah satu tokoh nasional yang cukup berperan dalam perjalanan bangsa ini, beliau seorang tokoh yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakkan konstitusional dan memiliki keluwesan dalam berjuang untuk membuktikan dan membangkitkan jiwa nasionalisme para pejuang bangsa di kala itu. Nasionalisme dapat juga dipahami dengan *kebangsaan* dan *kenegaraan*. Indonesia, misalnya, adalah sebuah *nation*, sebuah negara yang merdeka dan berkedaulatan rakyat. Jiwa Nasionalisme Sjafruddin berpijak pada keyakinan yang dimilikinya, yaitu keyakinan Islam. Hal ini tak perlu diragukan, karena beliau sudah membuktikan ketangguhannya dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, lewat perjuangan PDRI. Tanpa PDRI mungkin Indonesia hanya tinggal sebuah kenangan saja

Dalam karya-karya beliau tidak ada ungkapan-ungkapan yang menjelaskan secara gamblang yang menjelaskan tentang defenisi dan pengertian Negara dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara, hanya saja Sjafruddin sering mengemukakan ungkapan seperti pemerintahan, bangsa, nasional dan ungkapan-ungkapan lain yang semakna dengan itu, misalnya unkapannya, "apakah modal asing berbahaya bagi bangsa dan Negara kita?". Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian Negara menurut Sjafruddin, adalah Negara dalam pemahaman para cendekiawan modernnya, yang bertumpu pada satu wilayah yang dihuni oleh penduduknya dan mengemban tujuan hidup bersama dalam wilayah tersebut (Prawiranegara, 1988).

Sekalipun Sjafruddin banyak menempuh pendidikan formal pada sekolah Belanda, tapi yang cukup menarik adalah corak berfikirnya, cenderung "ala Islam" oelh karena itu tidak heran jika Sjafruddin selalu memperjuangkan agenda "negara Islam" yang demokratis, akan tetapi beliau tidak mau menyebutkan dan melabelkan dengan negara Islam, kareana menurutnya pe-labelan dengan negara Islam akan menjadikan kontraproduktif ditengah-tengah masyarakat. Negara, dipahami oleh Sjafruddin sebagai alat untuk membantu terlaksananya aturan-aturan Syari'at, dengan demikian negara dan agama merupakan kesatuan yang integral dalam kehidupan masyarakat.

Sjafruddin menjelaskan, bahwa negara "Bukan Aku" seperti pemahaman raja Prancis-Louis- pada abad ke-17 yang menyatakan "*L'etat C'eas Moi*" (Negara itu aku). Sungguh berbeda dengan pendapat

umum, bahwa negara itu berdiri untuk kepentingan semua golongan, tidak untuk perorangan, kelompok tertentu. Jadi dapat dipahami, negara didirikan di atas semua kelompok yang ada di dalamnya. Maka dengan demikian menurut Sjafruddin "kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berada pada tangan rakyat seluruhnya. Untuk menjalankan kuasa tertinggi ini dipilihlah Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan terjadinya peralihan kekuasaan pada seluruh rakyat itu, maka tujuan negara adalah untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk semua warga, bukan untuk kemakmuran satu-dua orang atau kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa saja. Pemerintahan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bekerja untuk kepentingan anggota-anggota golongan pemerintah. Bahkan seharusnya Pemerintah berposisi sebagai abdi rakyat (Prawiranegara, 1988).

Untuk mewujudkan dan mencapai kemakmuran bersama itu pemerintah bisa menempuh dua pilihan yang sudah dibentangkan oleh para ilmuwan terdahulu, yaitu:

*Pertama:* Pendirian pertama, beranggapan bahwa kemakmuran itu bisa dicapai bila mana pemerintah memberikan kebebasan terhadap masing-masing Individu untuk bersaing secara sehat dalam segala lapangan kerja. Tugas pemerintah mengawasi persaingan itu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, (Agen Polisi), sekalipun terlihat sepintas lalu untuk keuntungan pribadi, namun tetap ada manfaatnya untuk masyarakat luas.

*Kedua:* Reaksi dari pendirian kedua ini adalah, memberikan kebebasan kepada individu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tentu akan merusak sendi-sendi kehidupan yang bersifat kolektifitas (Neagara). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban mengatur, keuntungan yang diperoleh infidu itu harus dikembalikan kepada masyarakat luas secara adil dan merata. Menurut penulis pengembalian kepada rakyat banyak itu, mungkin bisa lewat pendistribusian pajak dalam system pemerintahan dan pengalokasian zakat dalam system ajaran agama. Lagi-lagi agama tidak bisa membantu pemerataan kemakmuran yang dituju oleh negara. Ini sebagai bukti bahwa agama bukanlah musuh negara, bahkan mitara pemerintah untuk mencapai tujuannya (Prawiranegara, 1988).

Jika dilayangkan pandang jauh ke belakang dalam sejarah kehidupan manusia, untuk mencapai kemakmuran itu sudah ada yang mencoba dengan sitem Kapitalisme dan Sosialisme, namun hasilnya adalah terjadinya penghisapan terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang tentunya tidak sesuai denga

prinsip-prinsip keadilan yang Universal, apalagi dengan system Islam.

Menurut Sjafruddin, prinsip-prinsip di ataslah yang diperjuangkan oleh Masyumi sebagai partai Islam, Masyumi mengambil jalan yang seimbang-jalan tengah-sesuai juga dengan ajaran Islam yang cocok pula berdasarkan akal sehat manusia. Bahwa tujuan bernegara untuk mencapai kemakmuran bersama akan disokong penuh oleh Masyumi. Bahkan untuk mengokohkan ide-idenya ini Sjafruddin mengemukakan beberapa ayat Al-quran sebagai dalil naqli, diantaranya; Surat Al-'araf ayat 96, Al-hasyr ayat 9, Al-baqarah ayat 208, annisa' ayat 94 dan 135, Al-ma'idah ayat 8, An-nahl ayat 92, Ali Imran ayat 92, At-taubah ayat 34-35 dan beberapa hadist yang berkenaan dengan masalah kemakmuran bersama ini.

Dari pokok-pokok pikiran Sjafruddin Prawiranegara yang sudah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pendapatnya tentang negara adalah, bahwa negara itu adalah kolektifitas dari warganya untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran. Pemerintah harus bisa bertindak sebagai Abdi masyarakat dan sebagai "Polisi" untuk mengatur dan menjamin hak-hak yang sama bisa diterima oleh setiap warganya. Jika keadaan semacam ini dapat diwujudkan dalam pemerintahan, maka produktifitas dalam masyarakat akan tercipta, dan produktifitas yang didapatkan oleh setiap warganya akan mendorong terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya (Prawiranegara, 1978).

Ada dua kutub berbeda pandangan dan pemahaman dalam meneropong persoalan agama dan negara. Kutub pertama adalah yang memandang perlunya agama dan negara dipersatukan atau disejajarkan, sedangkan kutub yang berbeda dari itu beranggapan bahwa perlu pemisahan antara agama dan negara (Syafiie, 1995).

Agama dalam pemahaman yang sangat sederhana dan pemaknaan awal adalah "tidak kacau" dengan demikian yang didambakan oleh agama adalah keteraturan dalam semua bidang. Sama halnya dengan negara, menginginkan hidup yang teratur dan damai sehingga cita-cita bersama bisa diwujudkan dengan baik. Dilihat dari pemaknaan itu sesungguhnya agama dan negara itu harus sejalan dan bergandengan, tidak harus dipertentangkan (Syafiie, 1995).

Agama dan keberagaman adalah produk sejarah, oleh karena itu agama bagaikan mata air yang tak pernah kering dan basi untuk dikaji, Penyelidikan terhadap agama tidak akan pernah memuaskan, termasuk dalam memahami pengertian

dari agama itu. Lebih jauh dari itu, Agama dipahami sebagai lembaga yang memuat seperangkat aturan yang berkenaan dengan tiga persoalan, yaitu; persoalan keyakinan, peribadatan dan system social (muamalah). Agama juga dapat diartikan sebagai sesuatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci (Suprayogi & Tobroni, 2001).

Sedangkan negara, Istilah negara diterjemahkan dari beberapa kata seperti *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (Bahasa Inggris) dan *l'état* (bahasa Prancis). Kata-kata tersebut sebenarnya diambil dari bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum* yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap.

Istilah negara juga digunakan dalam kitab-kitab fikih *Siyasah* klasik yang sering dipadankan dengan *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, *bilad*, dan *dar*. Istilah-istilah ini seringkali dipakai oleh sejumlah pemikir Muslim klasik untuk menyebut tentang negara. Penggunaannya pun tidak konsisten pada satu istilah. Di zaman modern, negara sering dipadankan dengan istilah *daulah*. Istilah inilah sampai sekarang lebih populer digunakan untuk menyebut negara. Istilah *daulah* oleh banyak kalangan lebih netral ketimbang istilah *imamah* yang seringkali merujuk pada mazhab *Syiah* dan *khilafah* yang seringkali digunakan oleh *Hizbut Tahrir*. Keseluruhan istilah yang muncul dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik hingga modern menunjuk pada pengertian negara (Ahmad, 2012).

Negara memiliki sifat sebagai wujud dan kedaulatannya. Sifat negara ini melekat dan menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi perilaku warga negaranya. Miriam Budiardjo menyebut tiga sifat negara, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sifat memaksa tercermin dalam peraturan yang telah dibuat agar dipatuhi oleh warga negaranya untuk mengatur ketertiban dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik (Budiardjo, 2003). Bagi Sjafruddin, peran agama dalam negara adalah sebagai alat kendali dan penggerak langkah bangsa ini, yang diistilahkan dengan "*Drive force*" oleh karena itu agama adalah suatu yang urgen dalam kehidupan bernegara, apalagi untuk mencapai sebuah kemajuan. Sjafruddin menilustrasikan kemajuan dan keunikan yang dicapai oleh kaum *Mormon* yaitu yahudi ortodoks di Amerika yang mampu membangun peradaban keagamaan yang tinggi, oleh karena

mendasari gerakannya dengan sebuah keyakinan agama yang dianutnya.

Termasuk keberanian dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang darurat sekalipun, harus didasari dengan keyakinan kepada agama, sebagai mana telah terjadi dalam dirinya untuk mengemban dan mengambil tanggung jawab sebagai presiden PDRI di saat Soekarno dan Hatta ditangkap belanda. Beliau mengungkapkan dengan rendah hati, "Kalaulah tidak karena bantuan dan bimbingan Allah saya tidak akan sanggup menjalani sebagi presiden PDRI ini"

Menurut Sjafruddin Prawiranegara, Negara yang baik adalah negara yang mampu menegakkan hukum dengan jujur dan adil. Pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum itu adalah alat-alat negara, seperti tentara, polisi, jaksa, hakim dan pegawai-pegawai sipil lainnya (Prawiranegara, 1988). Maka kewajiban alat negara ini adalah:

Pertama, Menjamin keselamatan harta dan jiwa setiap warga negara, sehingga dapat menjami kegiatan produktif.

Kedua, Menjamin tegaknya keadilan hukum dan keadilan social, dan negara harus lebih memperhatikan warga yang kurang mampu atau ekonomi lemah.

Ketiga, Membuat peraturan-peraturan dan kebijakan baru yang dapat menopang dan mempertinggi kemakmuran rakyat" *Welfare state*" Negara modern

Lebih lanjut Sjafruddin menjelaskan, bahwa sesungguhnya fitrah manusia itu sama, apabila diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, pasti ada rasa kekecewaan yang amat dalam. Perasaan ini sama pada setiap orang, baik di negara Kapitalis ataupun di negara Sosialis-Komunis.

### **Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara**

Suatu asas yang sangat mendasar dalam tatanan ekonomi Islam adalah sikap pertengahan dan keseimbangan yang adil. Hal ini akan dapat memicu dan memacu produktifitas dalam perekonomian, Syafruddin Prawiranegara mengistilahkan konsepsi Islam tentang ekonomi adalah jalan tengah antara Kapitalisme dan sosialisme. Jadi islam dapat dan mampu melahirkan revolusioner dengan cara yang evolusioner (Prawiranegara, 1978).

Melihat begitu pentingnya masalah ekonomi ini, maka Syafruddin melihat perlu ada pembenahan dalam sistem ekonomi di Indonesia, berdasarkan pengalaman dan fakta yang dilihatnya, maka beliau

sangat rajin mengajukan kritikan kepada pemerintah dan berupaya menawarkan solusi yang harus ditempuh pemerintah.

Lebih lanjut menurut Sjafruddin, ada dua pilar penting yang harus menjadi perhatian serius bagi negara yang ingin meujudkan keadilan social dan kesejahteraan rakyat yaitu;

*Pertama*; masalah Uang, Uang dalam pandangan Syafruddin Prawiranegara tak lebih dari benda", namun tentu saja punya nilai di mata manusia, akan tetapi tak boleh dijadikan segalanya dalam kehidupan. Di pihak lain, uang tak dapat terlepas dan dipisahkan dari dunia perbankan, hubungan antara uang dan bank dapatlah diibaratkan, bagaikan darah dengan jantung. Dengan artian, uang bagaikan darah dan bank itu adalah sebagai jantungnya" Maka baik buruknya dunia perekonomian sangat bergantung kepada perbankan yang dijalankan. Oleh karena itu para banker haruslah orang yang memiliki moralis dan etis (Prawiranegara, 1957)

Menurut Sjafruddin Filosofi uang yang salah dapat merusak moral dan etika. Sebagaimana apa yang dilakukan para raja di Eropa zaman dulu, yang berusaha mengumpulkan dan menumpuk kekayaan dengan berbagai cara." Oleh karena uang diciptakan manusia dan bertujuan mempermudah masyarakat dalam hubungan transaksi, maka tidaklah pantas uang dijadikan segalanya dalam hidup (Prawiranegara, 1957).

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa semakin modem suatu masyarakat, semakin butuh terhadap uang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Sebaliknya semakin primitif kondisi suatu masyarakat semakin berkurang tingkat kebutuhannya kepada uang. Oleh karena itu, zaman ini kehadiran uang tak dapat dielakkan. Dari pemikiran Syafruddin terkesan di satu pihak ingin memotifasi umat Islam agar tidak melepaskan diri dari uang tapi di satu pihak ingin membebaskan umat dari pemahaman bahwa uang itu dinilai segala-galanya sebagaimana yang terjadi di dunia kapitalis dan sosialis.

Dapat dipahami bahwa pandangan Syafruddin tetap berawal dari keyakinannya kepada agama, agar jangan menjadikan uang segalanya. Namun di satu pihak uang tidak bisa dilepaskan dari roda perekonomian, sebagai alat, uang harus mampu menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia, dan mampu juga meningkatkan produktifitas dalam kehidupan itu sendiri sesuai dengan filosofi penciptaan uang pada priode awal (Prawiranegara, 1971).

*Kedua*; Bank menurut Sjafruddin, Dalam masalah bank ini, khususnya di Indonesia Syafruddin berpandangan, bahwa bank itu penting sekali untuk pembangunan, karena fungsi bank itu ialah; menarik uang yang menganggur dalam masyarakat dan mengaktifkannya melalui pengusaha-pengusaha yang kekurangan likuiditas tetapi mempunyai cukup jaminan berupa barang-barang dagangan dan harta benda lainnya (Prawiranegara, 1957).

Lebih lanjut Syafruddin mengatakan bahwa, fungsi bank itu adalah membuat dan mengedarkan uang *chartal*, dan di Indonesia tugas ini diberikan kewenangan kepada bank sirkulasi. Sebetulnya ada tiga sumber pencipta uang yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yaitu pemerintah, bank sirkulasi, atau badan lain yang dapat memberi kredit (Prawiranegara, 1957).

Di Indonesia ada yang dinamakan dengan bank sentral dan tugas prakteknya adalah: "menjaga kestabilan nilai mata uang, kestabilan ini dijadikan sebagai alat atau pencapaian kemakmuran rakyat, dalam artian tujuan akhirnya adalah agar kemakmuran rakyat kecil tidak menjadi mundur. Syafruddin memandang bahwa tugas bank sentral, dimanapun di dunia pada prinsipnya sama, namun apa yang diterapkan bank sentral Barat tidaklah mesti dicontoh mentah-mentah oleh bank sentral Indonesia, disebabkan oleh keadaan masyarakatnya tidaklah sama.

Sejauh perjalanan sejarah Islam, persinggungan antara agama (Islam) dan negara mengalami dinamika yang amat rumit, baik abad klasik, pertengahan, modern dan masa kontemporer Islam, sesuai dengan perkembangan latar belakang dan dinamika social yang mengitarinya.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hubungan Islam dan negara juga mengalami pasang-surut serta dinamika yang tak kalah serunya. Oleh karena Indonesia dihuni oleh mayoritas warga yang memeluk Islam, maka mereka telah ikut memberikan perbendaharaan yang berharga untuk merumuskan corak relasi agama dan negara. Sebagaimana usaha yang sudah mereka lakukan untuk meng-integralkan agama kedalam negara, sama halnya dengan pemahaman orang-orang Sunni di saat kekuasaan khilafah-khilafah Islam. Namun di sisi lain, tetap mengundang "kecurigaan" dari penguasa. Sehingga dalam berbagai kesempatan pergantian kekuasaan, Islam ujung-ujung tetap dimarginalkan dan diposisikan sebagai kelompok-kelompok oposisi. Kecurigaan dan ketakutan dari penguasa terhadap

kekuatan "Islam Politik" terkesan eksis sampai saat sekarang, sekalipun pemerintah tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menyingkirkannya.

Pondasi dasar untuk tegaknya kemakmuran sebuah negara dalam pandangan Sjafruddin dapat disimpulkan kepada tiga hal pokok, yaitu: keadilan sosial, keadilan hukum dan keadilan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ketiga pondasi ini harus seiring sejalan dengan aturan-aturan agama sebagai batasan-batasan dan rambu-rambu pelaksanaannya. Selama ini tidak terlaksana, sulit untuk mencapai kemakmuran rakyat.

## SIMPULAN

Syafruddin seorang fanatime terhadap Islam sekaligus moderat dalam memandang realitas kehidupan, oleh karena itu menurutnya, agama harus menjadi dasar dari sendi-sendi kehidupan. Syafruddin Prawiranegara, sebagaimana tokoh-tokoh Masyumi lainnya, berpijak begitu kuat dengan prinsip-prinsip Islam dalam hal hubungan agama dan negara, konsep politik, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam masalah Demokrasi Syafruddin Prawiranegara senada juga dengan Muhammad Natsir, yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang "*Syura*" lebih dekat kepada rumusan demokrasi modern dengan meletakkan prinsip-prinsip *hudud* (batas-batas) dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan, seperti dalam demokrasi Islam, perumusan kebijakan politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. Semua kebijakan dan keputusan yang akan diambil itu harus mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Al-quran dan Sunnah nabi. Atau sekurang-kurangnya, kebijakan-kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan doktrin Islam.

Dalam hal agama dan negara, Syafruddin berpendapat bahwa agama dan negara merupakan kesatuan yang integral dan tidak bisa dipisahkan satu-sama lain. Ada ungkapan yang menarik dari Syafruddin Prawiranegara dalam tulisannya yang berjudul "*Islam, Insya Allah Pasti Menang*", beliau menyatakan bahwa, " Agama Islam tanpa *Syari'at* Islam adalah kosong". Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sjafruddin menginginkan negara yang bersyari'at, dengan tidak mengubah pancasila dan dasar-dasar negara, tapi mengisi kehidupan berbangsa dengan kehidupan agamis. Negara yang agamis itu adalah negara yang menerapkan Demokrasi yang berketuhanan.

Dalam hal agama dan negara, Syafruddin berpendapat bahwa agama dan negara merupakan kesatuan yang integral dan tidak bisa dipisahkan

satu-sama lain. Ada ungkapan yang menarik dari Syafruddin Prawiranegara dalam tulisannya yang berjudul *"Islam, Insya Allah Pasti Menang"*, beliau menyatakan bahwa, " Agama Islam tanpa *Syari'at* Islam adalah kosong". Dengan demikian dapat dipahami bahwa Syafruddin menginginkan negara yang bersyari'at, dengan tidak mengubah Pancasila dan dasar-dasar negara, tapi mengisi kehidupan berbangsa dengan kehidupan agamis. Negara yang agamis itu adalah negara yang menerapkan Demokrasi yang berketuhanan.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Syafruddin adalah seorang yang fanatis terhadap syariat Islam sekaligus moderat dalam memandang realitas kehidupan. *Kedua*, dalam hal agama dan negara, Syafruddin berpendapat bahwa agama dan negara bersifat integralistik dan tidak bisa dipisahkan satu-sama lain, *Ketiga*, Syafruddin berkomitmen kuat terhadap ajaran agama dan kemajuan bangsa, sehingga rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan itulah Syafruddin menyarankan konsep utama dalam usaha negara untuk mewujudkan stabilan ekonomi yaitu dengan ekonomi Islam, dengan menjaga pilar-pilar penting ekonomi dalam sebuah negara yaitu, bank, uang dan mengurangi modal dan investasi asing dalam pembangunan.

#### DAFTAR BACAAN

- Abbas, A. (2013). Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Syafruddin Prawiranegara. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Ahmad, S. (2012). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, F. K. (1993). *Beberapa Azaz Metodologi Ilmiah, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Inu Kencana Syafie. *Filsafat kehidupan*. Jakarta: Bhumi Aksara
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar sejarah Indonesia baru, sejarah pergerakan nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1997). *Metode Penggunaan Bahan Dokumen. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edited by Koentjaraningrat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, S. (1980). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Madinier, R. (2013). *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*. Mizan.
- Mustapa, H., & Syi'aruddin, M. A. (2020). Creative Understanding Dalam Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 133-172.
- Noer, D. (2005). *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat: parlemen Indonesia, 1945-1950*. Yayasan Risalah.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia* (Vol. 6). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Prawiranegara, S. (1957). *Beberapa Catatan Tentang Uang*. Jakarta: Gunung agung,
- Prawiranegara, S. (1957). *Tinjauan Singkat tentang Uang dan Bank Sentral*. Jakarta: Gunung Agung.
- Prawiranegara, S. (1967). *Peranan Hak-Hak Azasi Manusia Dalam kehidupan Politik dan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawiranegara, S. (1971). *Al-Aqabah Pendakian yang Tinggi (Beberapa Pikiran tentang Pembangunan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawiranegara, S. (1975). *Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan: Peranan Mu'jizat Dalam Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia: Ceramah Pada Tanggal 30 Juli 1975 Di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Prawiranegara, S. (1977). *Islam Insya Allah Pasti Menang*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Prawiranegara, S. (1978). *Islam dilihat dari kaca mata Modern*. Jakarta: Idayu Press.
- Prawiranegara, S. (1986). *Islam Sebagai Pedoman Hidup, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid I*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Prawiranegara, S. (1988). *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih, Jilid 2*. Jakarta: CV. Hajimasagung.
- Prawiranegara, S. (1988). *Ekonomi dan keuangan: Makana Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Prawiranegara, S. (1990). *Tugas Pemerintah Darurat RI dalam PDRI Dikaji Ulang*. Jakarta: MSI Pusat.
- Rosidi, A. (1986). *Syafruddin Prawirangegara Lebih Takut Kepada Allah Swt: Sebuah Biografi*. Jakarta: Inti Idayu Press.

- Saepudin, D. (2017). Sosialisme Religius dalam Konsep Sjafruddin Prawiregara. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 7(2), 255-264.
- Subrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarjat, E. (2017). Syafruddin Prawiranegara Biografi Pemikiran Islam Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, D. (2016). Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 63-84.
- Wulandari, C. D. A. (2012). Peran Politik Sjafruddin Prawiranegara Tahun 1945-1961. *Candi*, 4, 241364.
- Zed, M. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Zed, M., & Chaniago, H. (1999). PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi. *Jurnal Studi Amerika*.